



Nama Formulir:

**Lembar
Pengesahan
Karya Ilmiah**

No. Dikosongkan *(diisi admin
prodi)

Issue/Revisi 1

Tgl Berlaku -

Halaman 1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap Ahmad Khoirul Umam, PhD
Jabatan Dosen
Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional
NIP 218010320

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:

Diplomasi Publik Indonesia dibawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam
Mempromosikan Islam *Wasathiyah* terhadap Perdamaian di Afghanistan (2014-2024)

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap Karim Bakri
Jenjang S2/Magister
Program Studi Hubungan Internasional
NIM 220131079

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, Juli 2023

Penelaah,

Dr. Ahmad Khoirul Umam
NIP: 218010320

**DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA DI BAWAH PEMERINTAHAN PRESIDEN
JOKO WIDODO DALAM MEMPROMOSIKAN ISLAM *WASATHIYAH* TERHADAP
PERDAMAIAN DI AFGHANISTAN
(2014-2024)**

**Graduate School of Diplomacy
Universitas Paramadina
Karim Bakri (220131079)
karim.bakri@students.paramadina.ac.id**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi diplomasi publik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mempromosikan Islam *Wasathiyah* dan kontribusinya terhadap perdamaian di Afghanistan selama periode 2014-2024. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana diplomasi publik digunakan sebagai alat untuk membangun perdamaian melalui pendekatan Islam moderat (Islam *Wasathiyah*) dan mengeksplorasi dampak inisiatif ini terhadap stabilitas politik dan keamanan di Afghanistan. Analisis berbagai program dan inisiatif diplomasi publik menunjukkan bahwa Indonesia telah memanfaatkan konsep Islam *Wasathiyah* untuk menciptakan dialog lintas budaya dan agama yang berperan penting dalam upaya rekonsiliasi di Afghanistan.

Studi ini juga membahas peran aktor-aktor non-negara seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mendukung kebijakan diplomasi publik Indonesia, serta bagaimana kolaborasi dengan organisasi internasional memperkuat upaya diplomasi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi diplomasi publik Indonesia, yang menekankan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan perdamaian, telah memberikan kontribusi positif terhadap proses perdamaian di Afghanistan. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi literatur akademis tentang diplomasi publik dan peran agama dalam hubungan internasional, serta menawarkan wawasan praktis untuk kebijakan luar negeri Indonesia di masa depan.

Kata Kunci: Islam *Wasathiyah*, Diplomasi Publik, Perdamaian Afghanistan

Pendahuluan

Diplomasi perdamaian merupakan aspek penting dalam hubungan internasional, dan Indonesia telah memainkan peran yang signifikan dalam upaya perdamaian di berbagai konflik global. Melalui berbagai inisiatif diplomasi, Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk mempromosikan perdamaian melalui berbagai pendekatan. Sebagai contoh, Indonesia telah berperan aktif dalam menangani berbagai isu konflik di wilayah Asia Tenggara, termasuk krisis Rohingya. Bersama Malaysia, Indonesia telah mendukung Rohingya melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI) (Missbach & Stange, 2021). Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di Lebanon (Khoirunnisa et al., 2022). serta melibatkan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan MUI dalam agenda perdamaian, seperti upaya rekonsiliasi di Afghanistan (Pratama & Ferdiyan, 2021).

Diplomasi publik menjadi pilar penting karena tidak hanya berfungsi untuk memperkuat citra positif Indonesia sebagai negara damai, demokratis, moderat, dan toleran, tetapi juga sebagai jembatan untuk membangun pemahaman bersama melalui dialog dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, media massa, dan akademisi internasional. Dengan demikian, diplomasi Indonesia tidak hanya mengedepankan kepentingan politik dan ekonomi, tetapi juga berusaha untuk membentuk koneksi emosional dan intelektual yang kuat dengan masyarakat internasional.

Diplomasi publik mengacu pada upaya oleh pemerintah dan aktor non-pemerintah untuk mempengaruhi opini publik asing dan pembuatan kebijakan melalui pertukaran budaya, informasi, dan ide-ide (Cowan & Cull, 2008). Ini adalah alat penting untuk membangun jembatan antar masyarakat dan memperkuat hubungan bilateral dan multilateral.

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, diplomasi publik Indonesia kembali mengalami pergeseran dengan fokus pada demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam aktifitas Indonesia di berbagai forum internasional, seperti PBB dan ASEAN, untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Diplomasi publik Indonesia memasuki era baru dengan mengusung semangat Islam *Wasathiyah*. Indonesia telah berupaya mempromosikan citra Islam moderat atau "Islam *Wasathiyah*" melalui diplomasi publik dan soft power. Hal ini dilakukan untuk memposisikan Indonesia sebagai model Islam moderat di dunia, terutama setelah peristiwa 9/11 dan meningkatnya isu terorisme (J. Hoesterey, 2016)(Seeth, 2023).

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama, telah bekerja sama dengan organisasi-organisasi Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk melakukan dialog antar-agama, mediasi perdamaian, dan kegiatan diplomasi keagamaan lainnya baik di dalam maupun luar negeri (J. Hoesterey, 2016)(Seeth, 2023).

Konsep "Islam Nusantara" yang dipromosikan oleh NU juga menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk mempromosikan pemahaman Islam yang moderat, toleran, dan akomodatif terhadap kearifan lokal. Meskipun konsep ini menuai kritik dari kelompok Islam yang lebih konservatif, pemerintah tetap mendukung dan mengimplementasikannya sebagai bagian dari strategi melawan radikalisme (J. Hoesterey, 2016)(Mulia, 2022). Selain itu, Indonesia juga menyelenggarakan forum-forum internasional seperti Pertemuan Ulama Internasional (R20) untuk mempromosikan peran agama, khususnya Islam, sebagai solusi bagi permasalahan kemanusiaan global, bukan sebagai sumber konflik (Mulia, 2022)(Burdzik, 2019).

Secara keseluruhan, upaya Indonesia dalam mempromosikan citra Islam moderat melalui diplomasi publik dan soft power merupakan strategi untuk meningkatkan status dan pengaruh Indonesia di kancah internasional, sekaligus menangkal isu radikalisme dan terorisme yang dapat mengancam stabilitas domestik (J. Hoesterey, 2016)(Seeth, 2023). Dengan berbagai inisiatif diplomasi yang dijalankan, Indonesia terus berusaha aktif memperjuangkan perdamaian dan stabilitas baik di tingkat regional maupun global. Melalui upaya kerjasama multilateral, diplomasi budaya, kemanusiaan, dan pertahanan, Indonesia mempertegas komitmennya sebagai kekuatan yang berperan dalam mempromosikan perdamaian di dunia.

Penelitian ini berfokus pada analisis hubungan bilateral antara Indonesia dan Afghanistan selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kedua negara menjalin hubungan melalui pertemuan kepala pemerintahan sebelum kebangkitan Taliban, serta komunikasi antara pihak Taliban dengan Indonesia melalui sejumlah peristiwa kunjungan. Dinamika dalam praktek kehidupan sosial dan kultural umat Islam dapat menjadi titik koneksi antara Indonesia dan Afghanistan, terutama dalam konteks pengaruh Islam. Indonesia, yang mewakili wajah Islam *Wasathiyah*, memiliki kesempatan untuk mendalami kerangka kerja ini lebih lanjut. Selain itu, penting juga untuk mengamati peran yang dimainkan oleh organisasi

keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah dalam berbagai dialog, kunjungan, dan bantuan kepada Afghanistan.

Pengalaman dan keahlian dalam mengintegrasikan agama dan negara dapat menjadi rujukan yang berharga bagi Taliban dalam mengelola Afghanistan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran dan strategi diplomasi publik Indonesia di Afghanistan, khususnya dalam mempromosikan Islam *Wasathiyah*.

Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi dan kontribusi signifikan diplomasi publik Indonesia dalam mempromosikan konsep Islam *Wasathiyah* sebagai fondasi perdamaian di Afghanistan selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (2014-2024). Penelitian ini akan mengeksplorasi dua pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi diplomasi publik Indonesia dalam mempromosikan Islam *Wasathiyah* selama periode 2014-2024?
2. Bagaimana dampak inisiatif diplomasi publik Indonesia terhadap upaya-upaya perdamaian di Afghanistan ?

Melalui penelitian ini, saya akan menjelaskan dengan rinci bagaimana diplomasi publik Indonesia memanfaatkan konsep Islam *Wasathiyah* sebagai bagian dari upaya mempromosikan perdamaian di Afghanistan. Dengan merujuk pada penelitian-penelitian terkait seperti "*Moderation in Islam: a conceptual analysis of Wasathiyah*" (Ahmad, 2011); "*Religion and Public Diplomacy: The Role of Nahdlatul Ulama (NU) in Indonesia - Afghanistan Peace Agenda*" (Pratama & Ferdiyan, 2021); buku *Pengabdian Soft Power Diplomasi Indonesia dalam Perdamaian di Afghanistan* (Rachman, 2021); buku *The Middle Path of Moderation in Islam* (Kamali & Ramadan, 2015), saya dapat menggali lebih dalam tentang konsep Islam *Wasathiyah* dan bagaimana hal itu diterapkan dalam konteks diplomasi publik Indonesia.

Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme dan diplomasi publik sebagai alat analisis. Konstruktivisme menekankan bahwa realitas sosial, termasuk hubungan internasional, dibentuk oleh identitas dan norma yang tidak terlihat. Paradigma ini membantu menjelaskan bagaimana politik internasional merupakan hasil dari konstruksi sosial, yaitu

proses interaksi antara agen dan struktur, di mana lingkungan sosial-politik dan manusia saling berinteraksi untuk menghasilkan perubahan-perubahan dalam tatanan sosial-politik

Konstruktivisme muncul di akhir tahun 1980-an sebagai respon terhadap perdebatan dalam ilmu hubungan internasional. Pendekatan ini tertarik pada bagaimana objek dan praktik kehidupan sosial dikonstruksi, terutama yang dianggap oleh peneliti dan masyarakat sebagai sesuatu yang alamiah atau given (Hadiwinata, 2017). Bagi konstruktivis, pilihan tindakan aktor tidak selalu didasarkan pada logika konsekuensi yang menekankan perhitungan matematis atas kepentingan materi. Sebaliknya, pertimbangan kepantasan dalam mengambil keputusan untuk bertindak merupakan pengaruh utama terhadap aktor. Hal-hal yang bersifat non-material, seperti ide dan norma yang dibagi dalam pergaulan internasional, menjadi landasan bagi tindakan aktor (Hadiwinata, 2017).

Konstruktivis menolak klaim pengetahuan sebagai hukum obyektif yang digunakan untuk prediksi. Klaim terhadap pengetahuan hanya dapat dilakukan secara spesifik dan tidak semata-mata untuk tujuan prediksi. Mereka menolak logika konsekuensi (*logic of consequences*) dan lebih menekankan pada logika kepantasan (*logic of appropriateness*) (Rachmawati, 2016). Dengan demikian, tujuan dari diplomasi publik bagi konstruktivis tidak terletak pada kepentingan nasional semata karena mereka percaya bahwa kepentingan nasional akan selalu dapat berubah seiring dengan perubahan identitas negara yang terjadi melalui interaksi antar negara.

Tujuan dari diplomasi publik bagi Konstruktivis tidak terletak pada kepentingan nasional semata karena ia percaya kepentingan nasional akan selalu dapat berubah sejalan dengan berubahnya identitas negara yang terjadi karena interaksi antar negara. Diplomasi publik kemudian lebih dipahami sebagai interaksi aktor dalam menyampaikan pesan kepada aktor yang lain dan atau membentuk makna tertentu dalam benak mereka. Diplomasi publik juga dipahami sebagai upaya untuk mempengaruhi norma internasional melalui wacana publik (Zhang, 2006) menumbuhkan kesadaran publik dan akhirnya pembangunan hubungan baik antar negara (Rachmawati, 2016)

Pembahasan

Islam moderat gencar disosialisasikan di Indonesia dengan tujuan membendung penyimpangan dan sebagai upaya deradikalisasi pemahaman Islam (Zainuddin & Esha, 2008). Berbagai organisasi Islam, seperti MUI, NU dan Muhammadiyah, terlibat dalam penyemaian

wacana Islam moderat di Indonesia. MUI memunculkan wacana Islam *Wasathiyah*. Di saat yang hampir bersamaan, ormas Islam arus utama (*mainstream*) bersuara dengan konsepnya masing-masing. NU melahirkan Islam Nusantara. Muhammadiyah menyuarakan Islam Berkemajuan. Ini dilatarbelakangi oleh sejumlah tindak ekstrimisme dan terorisme atas nama Islam yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia (Najib & Fata, 2020).

Moderatisme merupakan sebuah istilah atau nomenklatur konseptual yang tidak mudah untuk didefinisikan. Hal ini karena ia menjadi istilah yang diperebutkan pemaknaannya (*highly contested concept*), baik di kalangan internal umat Islam maupun eksternal non-Muslim. Ia dipahami secara berbeda-beda oleh banyak orang, tergantung siapa dan dalam konteks apa ia didekati dan dipahami (Esposito, 2005).

Masdar Himly mengidentifikasi argumentasi-argumentasi yang digunakan kalangan Muslim yang menolak nomenklatur Islam moderat. *Pertama*, Islam moderat dianggap sebagai ketidakjelasan dalam beragama. Secara teologis, Islam moderat adalah Islam jalan tengah; tidak condong kepada Barat dan tidak pula condong Timur; mendayung antara liberalisme dan literalisme serta tekstualisme. *Kedua*, Islam moderat menandakan semangat keberagamaan yang lemah. Kelompok Islam moderat dianggap bukan kelompok Islam yang mencerminkan keberislaman yang sesungguhnya. *Ketiga*, moderatisme dipandang khas Barat yang tidak mempunyai akar teologis dan tradisi pemikiran dalam Islam (Hilmy, 2012).

A. Strategi Diplomasi Publik Indonesia

Strategi diplomasi publik Indonesia dijalankan melalui berbagai sektor, termasuk jalur resmi pemerintah dengan kunjungan kedua presiden, menteri, serta organisasi keagamaan melalui beberapa kesepakatan dan melibatkan masyarakat serta ulama sebagai aktor juga peserta kegiatan. Paradigma konstruktivisme membantu kita memahami bahwa identitas dan norma yang dimiliki Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim yang menganut Islam *Wasathiyah*, menjadi landasan bagi tindakan diplomasi publiknya. Melalui diplomasi publik, Indonesia berusaha membentuk opini publik asing dan menciptakan makna yang mendukung perdamaian dan stabilitas internasional

Pemerintah Indonesia melangkah dengan hati-hati dalam menghadapi Afghanistan yang dipimpin Taliban. Perlu dipastikan bahwa pemerintahan baru Taliban secara signifikan berbeda dari pemerintahan sebelumnya, dan terlibat dengan Taliban tidak akan menginspirasi tumbuhnya radikalisme Islam di Indonesia. Indonesia berhati-hati dalam memberikan

pengakuan diplomatik kepada rezim baru Taliban di Kabul. Ada alasan bagus untuk melakukannya. Pada Desember 2021, Indonesia membuka kembali kantor perwakilannya di Kabul untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Afghanistan. Ini adalah cara halus untuk terlibat di negara tersebut tanpa memberikan pengakuan diplomatik kepada pemerintah baru Taliban (Hasyim & Yew-foong, 2022).

Setelah menetapkan strategi diplomasi publik yang hati-hati dan mempertimbangkan identitas serta norma-norma Islam *Wasathiyah*, Indonesia telah berkontribusi secara signifikan dalam berbagai bidang untuk mendukung perdamaian di Afghanistan. Kontribusi ini mencakup:

- **Bidang Perdamaian**

Pada bulan November 2017, timbul optimisme baru terkait prospek perdamaian di Afghanistan ketika *High Peace Council* (HPC) atau Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia. Pimpinan HPC, Mohammad Karim Khalili, dengan terbuka menyatakan aspirasinya agar Indonesia dapat berperan sebagai mediator dalam upaya penyelesaian konflik di Afghanistan. Kunjungan ini terdiri dari 39 orang delegasi HPC dan diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor (Waluyo, 2017).

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Khalili menyatakan Indonesia sebagai contoh penerapan Islam yang tepat. Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi menyatakan akan segera mengundang ulama dari Afghanistan, Pakistan, dan negara lainnya sebagai langkah awal dalam mendukung proses perdamaian (Waluyo, 2017).

Lebih lanjut, upaya diplomasi publik Indonesia terlihat dalam kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, ke Afghanistan untuk menghadiri acara *Symposium on "the Role and Contribution of Afghanistan Women for Peace"* yang menyoroti peran dan kontribusi perempuan Afghanistan bagi perdamaian. Yohana merupakan menteri perempuan Indonesia pertama yang berkunjung ke Afghanistan. Kunjungan Menteri Yohana ke Afghanistan merupakan tindak lanjut dari kunjungan kenegaraan Presiden Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani pada 5-6 April 2017, sebagai kunjungan kenegaraan pertama dalam sejarah hubungan bilateral Indonesia – Afghanistan sejak 62 tahun lalu (Aini, 2017).

Istri Presiden Afghanistan mengundang semua perwakilan perempuan dari semua provinsi Afghanistan dengan sekitar 105 peserta yang hadir pada symposium tersebut. Menurut

Yohana, dia adalah perwakilan Indonesia pertama yang datang ke Afghanistan setelah Presiden Soekarno pada 1961 (Baiduri, 2017).

Inisiatif diplomasi publik Indonesia terus berlanjut dengan pertemuan antara Ibu Negara Afghanistan, Rula Ghani, dan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor. Salah satu topik utama yang dibahas adalah rencana pertukaran ulama. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengungkapkan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari kerja sama yang lebih luas yang diinisiasi setelah pendirian *Indonesia Islamic Centre* (IIC) di Kabul, Afghanistan. Pertukaran ulama ini diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral dan mempromosikan pemahaman antaragama melalui dialog dan pertukaran intelektual (Sohuturon, 2017).

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Afghanistan pada Senin, 29 Januari 2018, menghasilkan beberapa kesepakatan penting. Presiden Joko Widodo dan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani sepakat bahwa pembangunan perdamaian di Afghanistan harus didukung oleh pembangunan ekonomi negara tersebut, dengan kedua aspek tersebut berjalan secara beriringan. Kesepakatan ini disampaikan dalam pertemuan bilateral yang berlangsung sekitar satu jam di Istana Presiden Agr, Kabul, Afghanistan. Presiden Jokowi menekankan bahwa perdamaian dan kesejahteraan adalah dua hal yang saling terkait: "Tanpa perdamaian, tidak akan ada kesejahteraan. Tanpa kesejahteraan, perdamaian tidak akan lestari." Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya meningkatkan kerja sama ekonomi seiring dengan upaya membangun perdamaian (Ihsanuddin, 2018).

Selain itu, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia akan terus memperkuat program pengembangan kapasitas bagi masyarakat Afghanistan, termasuk dalam bidang pemberdayaan perempuan, pengembangan UKM, kesehatan, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan. Indonesia juga siap memberikan 100 beasiswa bagi pelajar Afghanistan. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Ghani berulang kali menyampaikan apresiasinya atas komitmen Presiden Jokowi dalam mendukung proses perdamaian di Afghanistan melalui berbagai bentuk kerja sama dalam konteks pembangunan perdamaian (Ihsanuddin, 2018).

Rula Ghani menyampaikan keinginannya untuk kembali ke Indonesia guna meninjau peran perempuan di tingkat masyarakat desa. Dalam diskusi tersebut, Rula juga membahas bagaimana perempuan Indonesia diberdayakan untuk membantu mendorong ekonomi melalui kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, Presiden Jokowi dan Rula

Ghani berdiskusi tentang langkah-langkah yang dapat diambil oleh Indonesia dan Afghanistan dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan (Sohuturon, 2017).

Kunjungan kenegaraan oleh Presiden Afghanistan Ashraf Ghani ke Indonesia pada 5-6 April 2017 menandai kunjungan pertama seorang Presiden Afghanistan ke Indonesia dan Asia Tenggara. Kunjungan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mendukung penuh perdamaian dan rekonsiliasi di Afghanistan, negara yang telah dicabik perang selama bertahun-tahun (Wardani, 2017). Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, Afghanistan merupakan mitra strategis dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan melalui nilai-nilai Islam moderat. Selama kunjungan tersebut, Presiden Ashraf Ghani dan Presiden Joko Widodo membahas berbagai aspek kerja sama bilateral dan upaya perdamaian di Afghanistan. Selain itu, kedua negara menandatangani perjanjian di bidang pendidikan, pertanian, dan reformasi birokrasi, yang memperkuat komitmen mereka untuk meningkatkan kerjasama di berbagai sektor penting (Wardani, 2017).

Dalam kunjungan kenegaraan ke Afghanistan pada 29 Januari 2018, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi menegaskan bahwa kunjungan ini sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia untuk membantu menciptakan perdamaian dunia. Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk ikut menjaga perdamaian dunia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi (Saputri, 2018).

Peresmian dan pembentukan Afghanistan Indonesia Women Solidarity Network (AISWN) di Kabul, Afghanistan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, serta penerimaan medali kehormatan 'Malalai' kepada Menlu Retno Marsudi oleh Presiden Ashraf Ghani, merupakan bukti peningkatan hubungan bilateral antara Afghanistan dan Indonesia. AISWN mencerminkan komitmen Indonesia dalam pemberdayaan perempuan Afghanistan dan memperkuat kerjasama antara kedua negara (MD et al., 2020).

- **Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Perempuan**

Kontribusi Indonesia dalam bidang ekonomi dan pemberdayaan perempuan mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan memberdayakan perempuan Afghanistan. Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) menyelenggarakan pelatihan ekspor-impor selama tiga hari di Kabul, bertajuk "*Training on Export-Import Procedure*" pada 7-9 Mei 2018. Pelatihan ini diikuti oleh 30 pengusaha dan pejabat pemerintah Afghanistan dan merupakan tindak lanjut dari kunjungan bilateral Presiden Joko Widodo ke

Afghanistan pada Januari 2018. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara. Pada tahun 2017, nilai ekspor Indonesia ke Afghanistan mencapai 20,2 juta dolar AS, meningkat 24,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara nilai impor dari Afghanistan sebesar 29 ribu dolar AS, menurun 6,45 persen dibandingkan tahun 2016 (Febrianto, 2018).

Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam Komisi Status Perempuan PBB di bawah naungan *Economic and Social Council* (ECOSOC), yang mendukung upaya pemerintah Afghanistan dalam pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari proses perdamaian di negara tersebut. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak melalui kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan *Ministry of Women's Affairs* (MOWA). Kerja sama ini dimulai pada 18 Desember 2013, ditandai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai pemberdayaan dan perlindungan perempuan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta peran perempuan dalam isu-isu kesehatan gender (MD et al., 2020).

MoU tersebut menjadi landasan bagi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kabul untuk melaksanakan berbagai kegiatan kerja sama yang telah disepakati oleh kedua negara. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan antara lain: kunjungan Menteri KPPPA ke Afghanistan, kunjungan Ibu Negara Afghanistan ke Indonesia, mengundang pengusaha perempuan Afghanistan untuk berpartisipasi dalam pameran dagang, lokakarya perdagangan, dan seminar di Indonesia. Selain itu, pemberian beasiswa dan kursus singkat bagi mahasiswa perempuan Afghanistan untuk belajar di Indonesia, serta penyelenggaraan Women Dialogue yang melibatkan wanita Afghanistan, termasuk yang berasosiasi dengan Taliban, dan dihadiri oleh korban perang juga menjadi bagian dari inisiatif ini (MD et al., 2020).

Salah satu program prioritas Kementerian PPPA yang mendasari keterlibatan Indonesia dalam pemberdayaan perempuan di Afghanistan adalah program "*three ends*" atau tiga akhiri. Program ini bertujuan untuk: a) mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, b) mengakhiri perdagangan manusia, dan c) mengakhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan. Dalam kerangka ini, KPPPA telah bekerja sama dengan MOWA untuk melaksanakan pelatihan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, pemberdayaan

perempuan melalui program keluarga berencana, intervensi ekonomi, dan pelatihan desain busana muslim (MD et al., 2020).

- **Pendidikan dan Keagamaan**

Melanjutkan dari upaya dalam bidang ekonomi dan pemberdayaan perempuan, Indonesia juga telah memberikan kontribusi signifikan dalam bidang pendidikan dan keagamaan di Afghanistan. Pemerintah Indonesia mendorong Otoritas Taliban untuk membuka kembali akses pendidikan bagi anak-anak perempuan Afghanistan. Indonesia siap berpartisipasi dalam dialog dan memberikan kontribusi dalam pembangunan pendidikan perempuan sesuai dengan ajaran Islam, mencakup madrasah, pendidikan menengah, perguruan tinggi, serta pembelajaran berbasis komunitas. Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi dalam Doha Forum 2023, khususnya dalam panel workshop pada *The International Conference on Afghan Women's Education* (Dzuhayatin, 2023).

Sebagai bagian dari inisiatif ini, pembangunan klinik kesehatan Indonesia Islamic Centre (IIC) menjadi implementasi dari Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2017 tentang hibah pemerintah untuk pembangunan klinik kesehatan di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul, Afghanistan. Penandatanganan Grant Agreement terkait hibah ini dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi, dan Menteri Luar Negeri Republik Islam Afghanistan, Salahuddin Rabbani, pada tanggal 6 November 2017 di Kabul. Pembangunan ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung sektor kesehatan di Afghanistan melalui kerja sama bilateral yang erat (Kementerian Luar Negeri, 2019).

Tujuan utama dari pembangunan IIC adalah untuk meningkatkan kapasitas di bidang pendidikan dan kesehatan, serta berfungsi sebagai pusat kebudayaan Indonesia di Afghanistan. Selain itu, IIC diharapkan dapat berperan dalam menjembatani ketegangan antar etnis di Afghanistan, sehingga mendukung proses perdamaian di negara tersebut. Dengan adanya IIC, Indonesia tidak hanya berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Afghanistan, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik dan mempromosikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia (Santi, 2018).

Komitmen pemerintah Indonesia untuk membantu perdamaian di Afghanistan tidak hanya terbatas pada partisipasi dalam konferensi Proses Kabul II, tetapi juga diwujudkan melalui pendirian *Indonesia Islamic Center* (IIC) di Jalan Ahmad Shah Baba Mina, Distrik 12, Kabul (Asyari, 2018). Pada 28 Februari 2018, dalam kunjungan kerjanya di Kabul, Wakil

Presiden Jusuf Kalla mengunjungi IIC setelah menghadiri pembukaan Konferensi Proses Kabul Kedua untuk Kerja Sama Perdamaian dan Keamanan di Istana Char Chinar. Di IIC, Jusuf Kalla meresmikan peletakan batu pertama untuk pembangunan klinik di kawasan tersebut. Setelah itu, ia menuju Masjid As Salam, mengenakan tutup kepala khas Afghanistan, Turban, yang diberikan oleh ulama setempat. Setelah melaksanakan salat sunnah, Jusuf Kalla berdialog dengan para ulama setempat (Asyari, 2018).

Indonesia juga memfasilitasi pengiriman pelajar perempuan dalam program Short Course on Introduction to Islam in Indonesia yang berlangsung dari 1 September hingga 13 Desember 2018. Program ini memberikan pendalaman agama Islam kepada 80 generasi muda Afghanistan yang belajar di Pondok Pesantren Tazakka di Batang, Jawa Tengah, dan Darul Ulum di Sukabumi, Jawa Barat. Pemerintah Indonesia melalui MUI memberikan beasiswa untuk mempelajari kebudayaan, kerukunan, keberagaman, toleransi beragama, serta hidup rukun dan damai dalam masyarakat multicultural (MD et al., 2020).

- **Peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah**

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memainkan peran krusial dalam mendukung diplomasi publik Indonesia di Afghanistan. NU dapat memprakarsai program mandiri, di luar program resmi Indonesia, untuk memperkuat keterlibatan publik antara Indonesia dan Afghanistan. Ulama Afghanistan, sebagai aktor penting dalam rekonsiliasi konflik, menunjukkan simpati yang lebih besar kepada NU melalui beberapa kunjungan ke kantor pusat NU di Jakarta dan inisiasi pendirian NU Afghanistan (NUA) secara independen di luar garis komando NU Indonesia (Pratama & Ferdiyan, 2021).

Salah satu kontribusi besar NU dalam diplomasi publik adalah melalui Konferensi Ulama dan Cendekiawan Muslim se-Dunia (*International Conference of Islamic Scholars/ICIS*) III, yang diinisiasi oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Acara yang berlangsung di Jakarta pada 29 Juli-1 Agustus 2008 ini bertujuan membantu menyelesaikan konflik di dunia Islam dan menciptakan peta jalan baru untuk perdamaian. Konferensi ini melibatkan 350 peserta dari 60 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Serikat, termasuk ulama, cendekiawan, akademisi, dan praktisi resolusi konflik. ICIS I (2004) mengangkat tema rekonstruksi pemikiran keagamaan, ICIS II (2006) membahas isu perdamaian dan keadilan global, dan ICIS III fokus pada perdamaian dan penyelesaian konflik di negara-negara Islam (Fahir, 2088).

Keprihatinan PBNU terhadap konflik yang terus melanda negara-negara di Timur Tengah dan Asia, seperti Suriah, Palestina, Afghanistan, dan Filipina, mendorong pelaksanaan *International Summit of The Moderate Islamic Leader (ISOMIL)* pada tahun 2016. ISOMIL menjadi sarana diplomasi bagi negara-negara Islam yang dilanda konflik, dengan tujuan mencegah penyebaran radikalisme dan mempromosikan pemahaman Islam moderat. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan posisi netral dalam konflik internasional, memiliki peran penting dalam diplomasi ini. PBNU berupaya mengembangkan pemahaman keagamaan yang moderat dan menggalang konsolidasi global untuk perdamaian, terbukti dengan terbentuknya NU Afghanistan (NUA) yang kini berperan aktif meredakan konflik di Afghanistan dan menolak radikalisme (Niam, 2016).

Muhammadiyah juga memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung perdamaian di Afghanistan melalui berbagai inisiatif. Sebagai bagian dari diplomasi publik, Muhammadiyah berfokus pada pengembangan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial di Afghanistan. Salah satu langkah nyata adalah melalui pelatihan ekspor-impor untuk para pengusaha Afghanistan, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam perdagangan internasional. Pelatihan ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah dalam memperkuat kapasitas ekonomi Afghanistan (Nubowo, 2023).

Peran Muhammadiyah dapat dilihat dari program pelatihan agama bagi generasi muda Afghanistan di Indonesia, seperti yang dilakukan di Pondok Pesantren Tazakka dan Daarul Ulum, untuk memperkenalkan Islam *Wasathiyah* yang moderat dan toleran. Inisiatif ini diharapkan dapat membangun fondasi perdamaian dan stabilitas di Afghanistan dengan memberikan pemahaman keagamaan yang lebih inklusif dan damai (Nubowo, 2023).

Pengalaman NU dalam menangani konflik keagamaan di luar negeri, termasuk pembentukan NUA pada tahun 2014, menunjukkan keberhasilan diplomasi publik Indonesia. NUA telah berkembang di 22 provinsi di Afghanistan, menyatukan lebih dari 6.000 ulama setempat, dan memainkan peran penting dalam meredakan konflik serta menolak radikalisme. NU di Afghanistan diharapkan menjadi oase perdamaian bagi rakyat Afghanistan yang cinta damai dan umumnya menganut ajaran Ahlussunah wal Jamaah. Dengan mengadopsi prinsip dan ajaran NU Indonesia, NUA diharapkan dapat menjadi organisasi besar yang dihormati dan menyampaikan pesan perdamaian, solidaritas, dan kemanusiaan (Niam, 2016).

B. Dampak Diplomasi Publik Islam *Wasathiyah* terhadap Perdamaian di Afghanistan

Upaya dari komitmen untuk mendukung perdamaian di Afghanistan, Pemerintah Indonesia menginisiasi program peningkatan kapasitas melalui pendalaman agama Islam bagi 80 generasi muda Afghanistan berusia 17 hingga 20 tahun. Program ini memungkinkan para peserta untuk belajar dan tinggal di pondok pesantren di Jawa Tengah (Tazakka) dan Jawa Barat (Daarul 'Uluum). Inisiatif ini merupakan langkah konkret dari Pemerintah Indonesia untuk mendukung perdamaian di Afghanistan dan merupakan kelanjutan dari Pertemuan Trilateral Ulama Afghanistan, Indonesia, dan Pakistan pada 11 Mei 2018 di Istana Bogor, yang menghasilkan Deklarasi Ulama Bogor untuk Perdamaian (Humas Wakil Presiden, 2018).

Dalam penyampaian prioritas politik luar negeri Republik Indonesia 2019-2024, Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, menyampaikan bahwa isu "*Women, Peace, and Security*" tetap menjadi perhatian politik luar negeri Indonesia. Dalam kaitan ini, isu pemberdayaan perempuan dan demokrasi menjadi topik bahasan dalam Bali Democracy Forum tahun 2019. Upaya untuk membentuk *Network* Asia Tenggara bagi negosiator dan mediator perempuan terus dijalankan dan dikaitkan dengan networking di bagian dunia lainnya. Diplomasi perdamaian dan kemanusiaan dengan tujuan memberikan kontribusi konkret dalam penyelesaian masalah, termasuk isu perdamaian di Afghanistan, menjadi prioritas utama (Marsudi, 2019).

Kerja sama antara Indonesia dan Afghanistan dari tahun 2017 hingga 2020 menunjukkan keterlibatan NU dalam beberapa agenda penting. Pertama, keterlibatan NU dalam konferensi Ulama Trilateral Bogor. Kedua, menjadi tuan rumah dalam menyambut kunjungan Taliban pada tahun 2019. Ketiga, mengirimkan perwakilan perempuan dalam program Jaringan Solidaritas Perempuan Afghanistan Indonesia (Pratama & Ferdiyan, 2021).

Keberhasilan diplomasi publik, menurut Shaun Riordan, tidak hanya ditentukan oleh penegasan nilai-nilai tetapi dengan terlibat dalam dialog yang tulus melalui kolaborasi dengan masyarakat sipil yang lebih luas (Riordan, 2007). James Hoesterey menambahkan bahwa pandangan Islam moderat di Indonesia telah terinternalisasi ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari diplomat hingga pemuka agama, institusi pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi keagamaan (J. Hoesterey, 2016)

Sebagai contoh konkret, Pemerintah Indonesia melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) mengirimkan bantuan 10 juta dosis vaksin polio bOPV ke Afghanistan. Bantuan ini merupakan dukungan konkret terhadap program vaksinasi Afghanistan yang akan menjangkau 3,3 juta anak-anak usia di bawah tiga tahun. Pengangkutan dan distribusi vaksin dilakukan oleh UNICEF berkoordinasi dengan pihak Afghanistan (Kementerian Luar Negeri, 2024).

Menjalankan diplomasi tingkat tinggi adalah aktualisasi posisi dan peran Indonesia sebagai “kekuatan tengah” (*middle power*). Indonesia punya potensi memberikan kontribusi pada rekonstruksi Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. Indonesia memiliki akses besar pada petinggi Taliban, seperti terlihat dalam kunjungan Presiden Jokowi pada 29 Januari 2018 dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 28 Februari-1 Maret 2018 di tengah konflik dan kekerasan yang berkecamuk. Kontak, pertemuan, dan pembicaraan intensif dengan petinggi Taliban sejak 2018 merupakan aset historis dan akses penting bagi Indonesia untuk “membantu” pemerintahan Taliban (Azra, 2021).

Pada pertemuan luar biasa tingkat menteri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada akhir Desember 2021, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi memaparkan syarat-syarat untuk meningkatkan hubungan diplomatik. Ini termasuk pembentukan pemerintahan yang inklusif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak perempuan, dan memastikan bahwa negara tidak menjadi tempat berkembang biaknya terorisme (Hasyim & Yew-foong, 2022).

Islam *Wasathiyah* atau Islam jalan tengah (*middle path* atau *justly-balanced Islam*) telah menjadi bagian penting terintegrasi dalam diplomasi publik Indonesia di kancah internasional sejak masa reformasi. Perubahan politik Indonesia dengan transisi dan konsolidasi demokrasi sejak 1999 mengukuhkan kompatibilitas demokrasi dengan Islam Indonesia; dan mengangkat Islam *Wasathiyah* sebagai arus utama kaum Muslimin menjadi bagian pokok diplomasi publik Indonesia. (Azra, 2021)

Peran diplomasi publik Indonesia juga ditandai dengan signifikannya peran ulama, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan yang terlibat dalam promosi Islam *Wasathiyah*. Termasuk di dalamnya adalah pemberian beasiswa pendidikan oleh Muhammadiyah dan penyelenggaraan dialog oleh NU. Peran ini menunjukkan bahwa diplomasi publik Indonesia

melalui Islam *Wasathiyah* menciptakan pengaruh positif yang signifikan terhadap perdamaian di Afghanistan

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) sekaligus Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), melakukan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri 2 Mullah Abdul Salam Hanafi dan Menteri Luar Negeri Mawlawi Amir Khan Muttaqi pada kunjungannya ke Kabul, Afghanistan pada 2 Juni 2024. Pertemuan ini menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan, dengan JK menyatakan kesiapan Indonesia untuk mendukung upaya tersebut. Pemerintah Afghanistan menunjukkan keterbukaan terhadap pandangan yang disampaikan, dan berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah menuju kesetaraan secara bertahap, sesuai dengan undang-undang dasar mereka yang sudah mengatur kesetaraan gender (Akmal, 2024).

JK juga mencatat perubahan positif di Afghanistan sejak kunjungan terakhirnya pada tahun 2020, termasuk peningkatan keamanan dan kemajuan birokrasi. Ia mengamati bahwa masyarakat Afghanistan sekarang dapat berjalan bebas di malam hari, dengan banyaknya toko yang terbuka dan peningkatan jumlah penerbangan di bandara. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek keamanan dan kehidupan sehari-hari di bawah pemerintahan Taliban. Selain itu, pertemuan juga membahas potensi kerja sama ekonomi, terutama dalam eksplorasi sumber daya alam mineral Afghanistan (Akmal, 2024).

Kesimpulan

Dampak diplomasi publik Indonesia melalui pendekatan Islam *Wasathiyah* terhadap perdamaian di Afghanistan menunjukkan hasil yang signifikan. Melalui berbagai inisiatif, seperti program peningkatan kapasitas dan pendalaman agama Islam bagi generasi muda Afghanistan, Indonesia berhasil memberikan kontribusi nyata dalam mendukung proses perdamaian di negara yang dilanda konflik tersebut. Partisipasi Indonesia dalam berbagai forum internasional dan kerja sama bilateral, seperti Pertemuan Trilateral Ulama dan Bali Democracy Forum, mempertegas komitmen Indonesia terhadap isu perdamaian, pemberdayaan perempuan, dan keamanan.

Peran aktif organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam mempromosikan Islam *Wasathiyah* juga menjadi pilar penting dalam diplomasi publik Indonesia. NU, melalui konferensi ulama dan inisiatif independen, serta Muhammadiyah,

melalui program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, telah menunjukkan kemampuan diplomasi yang kuat dalam membangun jembatan dialog dan pemahaman antara Indonesia dan Afghanistan. Inisiatif seperti pendirian *Indonesia Islamic Centre* (IIC) di Kabul dan pemberian beasiswa kepada pelajar Afghanistan menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung pembangunan pendidikan dan kesehatan di Afghanistan.

Keberhasilan diplomasi publik Indonesia juga didukung oleh prinsip moderasi dan keseimbangan yang diusung oleh Islam *Wasathiyah*. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan, termasuk hak dan kewajiban, tradisi dan modernitas, serta kepentingan individu dan masyarakat. Dengan pendekatan ini, Indonesia mampu menciptakan pengaruh positif yang signifikan terhadap perdamaian dan stabilitas di Afghanistan.

Secara keseluruhan, diplomasi publik Indonesia melalui pendekatan Islam *Wasathiyah* telah berhasil membangun fondasi perdamaian yang kuat di Afghanistan. Inisiatif-inisiatif yang dilakukan tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi pembangunan kapasitas masyarakat Afghanistan. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim yang moderat, berhasil menunjukkan bahwa Islam *Wasathiyah* dapat menjadi alat efektif dalam mempromosikan perdamaian dan menolak radikalisme di kancah internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. A. (2011). Moderation in Islam: a conceptual analysis of Wasatiyyah. *TAFHIM : IKIM Journal of Islam and the Contemporary World*, 4(1), 29–46. <https://doi.org/10.56389/tafhim.vol4no1.2>
- Aini, N. (2017). *Menteri Yohana: perempuan jadi penjaga perdamaian*. Republika.Co.Id. <https://internasional.republika.co.id/berita/oq2o32382/menteri-yohana-perempuan-jadi-penjaga-perdamaian>
- Akmal. (2024). *Berkunjung ke Afghanistan, JK bahas soal kesetaraan pendidikan perempuan*. Mediaindonesia.Com. <https://mediaindonesia.com/internasional/675336/berkunjung-ke-afghanistan-jk-bahas-soal-kesetaraan-pendidikan-perempuan>
- Asyari, Y. (2018). *Wapres JK bangun klinik Indonesia Islamic Center di Kabul*. Jawapos.Com.

- <https://www.jawapos.com/nasional/0153765/wapres-jk-bangun-klinik-indonesia-islamic-center-di-kabul>
- Azra, A. (2021, September 7). Diplomasi RI dan Taliban. *Kompas.Id*.
<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/09/07/diplomasi-ri-dan-taliban>
- Baiduri, M. N. I. (2017). *Cerita Menteri Yohana berbicara di forum perempuan Afganistan*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/876867/cerita-menteri-yohana-berbicara-di-forum-perempuan-afghanistan>
- Burdzik, T. (2019). *Between Pancasila and Islam: Indonesia's soft power challenge*. Russian International Affairs Council. <https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/columns/asian-kaleidoscope/between-pancasila-and-islam-indonesia-s-soft-power-challenge/>
- Cowan, G., & Cull, N. J. (2008). Public Diplomacy in a Changing World. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 291–317.
<https://doi.org/10.1177/0002716208314503>
- Dzuhayatin, S. R. (2023). *Lewat Doha Forum 2023, Indonesia dorong Taliban buka kembali kesempatan belajar untuk perempuan Afghanistan*. Kantor Staf Presiden.
<https://www.ksp.go.id/lewat-doha-forum-2023-indonesia-dorong-taliban-buka-kembali-kesempatan-belajar-untuk-perempuan-afghanistan.html>
- Esposito, J. L. (2005). Moderate Muslims. *American Journal of Islam and Society*, 22(3), 11–20. <https://doi.org/10.35632/ajis.v22i3.465>
- Fahir, A. (2088). *ICIS, eksperimentasi intelektual dan penguatan peran global NU*. Nu.or.Id.
<https://nu.or.id/opini/icis-eksperimentasi-intelektual-dan-penguatan-peran-global-nu-uqyJR>
- Febrianto, V. (2018). *Kemendag beri pelatihan ekspor-impor untuk pengusaha Afghanistan*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/707690/kemendag-beri-pelatihan-ekspor-impor-untuk-pengusaha-afghanistan>
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan teori hubungan internasional: arus utama, alternatif, dan reflektivis* (1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hasyim, S., & Yew-foong, H. (2022). *Indonesia and Taliban-Led Afghanistan: treading with caution*. Fulcrum.Sg. <https://fulcrum.sg/indonesia-and-taliban-led-afghanistan-treading-with-caution/>

- Hilmy, M. (2012). QUO-VADIS ISLAM MODERAT INDONESIA? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36(2), 262–281. <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i2.127>
- Hoesterey, J. (2016). *Rebranding Islam: public diplomacy, soft power, and the making of “moderate Islam.”* University of Notre Dame. <https://contendingmodernities.nd.edu/field-notes/aci-indonesia-rebranding-islam-public-diplomacy-soft-power-and-the-making-of-moderate-islam/>
- Hoesterey, J. B. (2015). *Public diplomacy and the global dissemination of “moderate Islam.”* 406–416.
- Humas Wakil Presiden. (2018). *Buka program pendalaman agama Islam bagi pelajar Afghanistan.* Wapresri.Go.Id. <https://www.wapresri.go.id/buka-program-pendalaman-agama-islam-bagi-pelajar-afghanistan/>
- Ihsanuddin. (2018). *Bertemu Presiden Afghanistan, Jokowi dorong upaya perdamaian dan hubungan dagang.* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/30/10140391/bertemu-presiden-afghanistan-jokowi-dorong-upaya-perdamaian-dan-hubungan>
- Kamali, M. H., & Ramadan, T. (2015). *The middle path of moderation in Islam.* Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190226831.001.0001>
- Kementerian Luar Negeri. (2019). *Dipastikan lancar, pembangunan hibah klinik Indonesia Islamic Center di Afghanistan.* Kementerian Luar Negeri. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/436/berita/dipastikan-lancar-pembangunan-hibah-klinik-indonesia-islamic-center-di-afghanistan#!>
- Kementerian Luar Negeri. (2024). *Indonesia kirim bantuan 10 juta dosis vaksin Polio ke Afghanistan.* Kementerian Luar Negeri. <https://kemlu.go.id/portal/idBeranda/read/5799/berita/indonesia-kirim-bantuan-10-juta-dosis-vaksin-polio-ke-afghanistan>
- Khoirunnisa, T. A., Jannah, R. A. F., Qonita, M., & Tjondrodewi, D. C. (2022). Kontribusi Indonesia dalam peacekeeping mission di Lebanon sebagai implementasi diplomasi pertahanan. *Transformasi Global*, 09(1), 70–83. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.009.01.6>
- Marsudi, R. L. P. (2019). *Penyampaian prioritas politik luar negeri Republik Indonesia 2019-2024.*

- MD, A. R., Aulia, M., Abdulrab, N., Purwadi, Y., Fajar, M. D., & Ayunda, A. A. S. D. (2020). Diplomasi Indonesia dalam memperkuat komitmen pemberdayaan perempuan untuk mendukung proses perdamaian Afghanistan. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(2), 259–276. <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i2.4422.259-276>
- Missbach, A., & Stange, G. (2021). Muslim solidarity and the lack of effective protection for Rohingya refugees in Southeast Asia. *Social Sciences*, 10(5), 166. <https://doi.org/10.3390/socsci10050166>
- Mulia, J. R. (2022). *Indonesia's soft power diplomacy in R20, promoting Indonesian Islam to the world*. Modern Diplomacy.
- Najib, M. A., & Fata, A. K. (2020). Islam Wasatiyah dan kontestasi wacana moderatisme Islam di Indonesia. *Jurnal THEOLOGIA*, 31(1), 115. <https://doi.org/10.21580/teo.2020.31.1.5764>
- Nashir, H. (2019). Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan perspektif sosiologi. *Pidato Guru Besar*, 2(2), 1–84. <http://s3pi.umy.ac.id/wp-content/uploads/2020/02/PIDATO-GB-Haedar-Nashir-UMY.pdf>
- Niam, M. (2016). *ISOMIL, sarana diplomasi untuk damaikan konflik di dunia Islam*. Ansor Purworejo. <https://ansorpurworejo.org/berita/isomil-sarana-diplomasi-untuk-damaikan-konflik-di-dunia-islam/>
- Nubowo, A. (2023). Promoting Indonesian moderate Islam on the global stage: non-state actors' soft power diplomacy in the post-New order era. *Muslim Politics Review*, 2(2), 238–283. <https://doi.org/10.56529/mpr.v2i2.204>
- Pratama, E. G., & Ferdiyan. (2021). Religion and public diplomacy: the role of Nahdlatul Ulama (NU) in Indonesia - Afghanistan peace agenda. *Jurnal Penelitian IAIN Pekalongan*, 18(1), 1–12. <https://doi.org/10.28918/jupe.v18i1.1429>
- Rachman, A. (2021). *Pengabdian soft power diplomasi indonesia dalam perdamaian di afghanistan*.
- Rachmawati, I. (2016). Pendekatan Konstruktivis dalam Kajian Diplomasi Publik Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(2). <https://doi.org/10.18196/hi.5290>
- Santi, N. (2018). *As-Salam, masjid Indonesia di Afghanistan*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180112112226-113-268385/as-salam-masjid-indonesia-di-afghanistan>

- Saputri, D. S. (2018). *Jokowi: kunjungan ke Afghanistan untuk perdamaian*. Republika.Co.Id. <https://internasional.republika.co.id/berita/p3eocz377/jokowi-kunjungan-ke-afghanistan-untuk-perdamaian>
- Seeth, A. thoo. (2023). Indonesia's Islamic Peace Diplomacy: Crafting a Role Model for Moderate Islam. *GIGA Focus Asia*, 2, 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.57671/gfas-23022>
- Sohuturon, M. (2017). *Temui Jokowi, Ibu Negara Afghanistan bahas pertukaran Ulama*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171205233808-106-260386/temui-jokowi-ibu-negara-afghanistan-bahas-pertukaran-ulama>
- Waluyo, A. (2017). *Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan berharap peran Indonesia atasi konflik di Afghanistan*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-diharapkan-ikut-berperan-atasi-konflik-di-afghanistan/4129788.html>
- Wardani, H. L. (2017). *Presiden Afghanistan kunjungi Indonesia bulan april 2017*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-3460436/presiden-afghanistan-kunjungi-indonesia-bulan-april-2017>
- Zainuddin, M., & Esha, M. I. (2008). *Islam moderat: konsepsi, interpretasi, dan aksi*. UIN Maliki Press.
- Zhang, J. (2006). Public diplomacy as symbolic interactions: a case study of Asian tsunami relief campaigns. *Public Relations Review*, 32(1), 26–32. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2005.10.004>